

BAB V

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaporan keuangan pada Kantor Camat Tojo sudah baik sebagai berikut:

1. Laporan pada tahun anggaran 2018, total realisasi belanja tidak langsung adalah Rp. 1.903.981.233 dari total anggaran Rp. 1.916.585.019. atau 99,34% sedangkan anggaran belanja tidak langsung tahun 2019 Rp. 2.349.534.358 dari total anggaran Rp. 2.460.661.040 atau 95,48%. Berdasarkan persentase penggunaan anggaran 2018 dan 2019 untuk belanja tidak langsung pada kantor Kecamatan Tojo pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase belanja tidak langsung.
2. Laporan pada tahun anggaran 2018, total realisasi belanja langsung adalah Rp. 705.353.497 dari total anggaran Rp. 711.592.147. atau 99,12% sedangkan anggaran belanja langsung tahun 2019 Rp. 655.182.900 dari total anggaran Rp. 680.010.000 atau 96,35%. Berdasarkan persentase penggunaan anggaran 2018 dan 2019 untuk belanja langsung pada kantor Kecamatan Tojo pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase.

4.2 Saran

Saran penulis Untuk tahun anggaran berikutnya yaitu:

1. Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja Kantor Kecamatan Tojo dapat berpedoman sepenuhnya kepada peraturan

pemerintah nomo 71 tahun 2010, agar pengelolaan keuangan yang disajikan benar-benar efektif dapat terwujud dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

2. Kantor Kecamatan Tojo perlu menambah sumber daya manusia yang handal dan memiliki spesialisasi dibidang akuntansi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan pada OPD. Serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.
3. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Kantor Kecamatan Tojo dapat lebih baik lagi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan belanja tidak langsung.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2003. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta
-2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
-2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
-2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007. Kata Pengelolaan
- Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Horne and John Wachowicz. 2005. *Fundamentals of Financial: Management Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Penerjemah: Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Martono dan Harjito 2008. *Manajemen Keuangan*, edisi 1. Yogyakarta: Ekonesia
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Grafika
- Sudana 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.